

Laporan 100 Hari



Kerja

Kepala Perwakilan BKKBN
Daerah Istimewa Yogyakarta

NOVEMBER 2024





Daftar Isi

i Daftar isi	08 Pemutakhiran PK-24 di DIY Selesai Tepat Waktu dan Melebihi Target hingga 100,19%
ii Kata Pengantar	09 Janji Cinta Menuju Predikat ZI-WBK
iii <i>Highlight 100 Hari Kerja</i>	11 <i>Population Clock, Gugah Kesadaran Masyarakat</i>
01 Profil Mohamad Iqbal Apriansyah	12 Pesan Cegah Stunting Bagi Bapak-Bapak
02 Penguohan Oleh Gubernur DIY	13 Kerjasama BKKBN DIY dan Korem 072 / Pamungkas
03 Terbaik Pertama Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	14 BKKBN DIY Kembangkan Portal SINTA
04 KB Pasca Persalinan, Jurusan Jitu Cegah Stunting Baru	15 Kepala Perwakilan BKKBN DIY Naik Motor Sambut ratusan Motor PKB Roadsos Se-Jawa
05 Ditarget 1, BKKBN DIY Berhasil Bentuk 10 Sekolah Lansia	16 Wagub/Ketua TPPS DIY Apresiasi Predikat "Sangat Baik" Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Kabupaten/Kota
06 Internalisasi Pengasuhan Balita di Kelas Orang Tua Hebat (KERABAT)	17 Daerah Istimewa Yogyakarta, BKKBN-nya Juga Harus Istimewa
07 Dorong UPPKA Naik Kelas, Miliki NIB dan Gabung Sibakul	18 Piagam Penghargaan dalam 100 Hari Kerja

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya ungkapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa karena tepat 100 hari sejak dilantik, laporan kinerja ini dapat saya haturkan kepada Bapak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN dan Ibu Wakil Menteri serta para Pejabat Tinggi Madya.

Laporan 100 hari kerja merupakan indikator pragmatis kinerja bagi pejabat yang menempati pos jabatan baru baik karena rotasi jabatan pada eselon yang sama maupun karena promosi. Saya menyadari bahwa waktu 100 hari terlalu singkat untuk melakukan perubahan yang nyata terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses bisnis di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karenanya momentum 100 hari pertama menjabat sebagai Kepala Perwakilan pertama-tama saya gunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pencapaian program.

Seratus hari pertama juga saya pergunakan untuk melakukan konsolidasi internal dan memperkuat jejaring yang ada guna meningkatkan capaian yang masih rendah. Tentu tidak mungkin seluruh capaian rendah bisa ditingkatkan dalam waktu sesingkat itu sehingga upaya yang saya lakukan bersama jajaran dimaksudkan untuk meletakkan dasar bagi upaya peningkatan capaian kinerja selanjutnya.

Sejumlah keberhasilan sebagaimana akan disampaikan dalam laporan ini diharapkan menjadi stimulus untuk meningkatkan upaya peningkatan capaian indikator kinerja lainnya dalam jangka waktu yang lebih panjang dari 100 hari pertama saya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saya menyampaikan apresiasi kepada Tim Media Center Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyusun Laporan 100 Hari Kerja ini dalam format majalah yang berisi rilis-rilis berita berbagai kegiatan yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian program, dengan tujuan agar lebih leluasa dalam menggambarkan capaian kinerja. Selain dalam bentuk hard copy (cetak) laporan berformat majalah ini juga kami tampilkan dalam bentuk e-magazine.

Semoga Laporan 100 Hari Kerja ini dapat menjadi bahan inspirasi dan kontribusi atas kinerja saya selaku Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 29 November 2024



Mohamad Iqbal Apriansyah

Highlight

100

bkkbn
Yogyakarta



HARI KERJA

KEPALA PERWAKILAN BKKBN D.I.YOGYAKARTA

NILAI SEMPURNA PADA IKPA BMN

Berpredikat Sangat Baik dengan nilai sempurna (100) periode Semester I-III Tahun Anggaran 2024 Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta

CAPAIAN PELAYANAN KB 146,6%

Capaian Pelayanan KB Tertinggi Kategori target 10.001-15.000 Akseptor pada Pelayanan KB Serentak Hari Kontrasepsi Sedunia 2024

TERBENTUK 10 SEKOLAH LANSIA

Pada Tahun 2024 di D.I.Yogyakarta terbentuk 10 Sekolah Lansia yang terdiri dari 2 Sekolah Lansia dengan dukungan Anggaran APBN, 6 Sekolah Lansia dengan dukungan APBD dan 2 Sekolah Lansia dengan Anggaran Mandiri

11 KERABAT KERJA SAMA DENGAN HIMPSI

KERABAT kerja sama dengan HIMPSI dan mengundang narasumber tokoh masyarakat seperti Gusti Putri, Ketua TP PKK Bantul, dll.

AKSELARASI NIB UNTUK UPPKA

Perjanjian Kerja Sama Pentahelix dengan Dinas Koperasi dan UKM sehingga Kelompok UPPKA bisa mengakses seluruh kegiatan termasuk Sibakul dan Pelatihan yang dilakukan oleh Diskop UKM DIY

CAPAIAN MONITORING PK24 SEBESAR 100,19%

Peringkat ke 5 Nasional Monitoring Pemutakhiran PK24

JANJI CINTA MENUJU ZI WBK

Salah satu inovasi pada area Manajemen Perubahan dengan melaksanakan gerakan meningkatkan motivasi kerja Pegawai Perwakilan BKKBN DIY, sepakat memajang foto keluarga masing-masing di meja kerja

POPULATION CLOCK

Bekerja sama dengan Dinas Kominfo DIY, berhasil dipasang Population Clock pada 3 titik strategis

ANGKRINGAN KAMPANYE PPS

Kepala Perwakilan BKKBN DIY melaksanakan Kampanye PPS dengan kearifan lokal bekerja sama dengan TVRI di Acara Angkringan dengan rating tertinggi

PENGADAAN AIR BERSIH BERSAMA TNI DAN MITRA KERJA

Empat titik lokasi di empat kabupaten. Sebanyak 501 Kepala Keluarga risiko stunting dengan 2.031 jiwa di lokasi sulit air

SINTA TPK

Memudahkan Kader TPK untuk mengakses materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun serta mempermudah untuk memperoleh sertifikat



Profil

Mohamad Iqbal Apriansyah

"Karir saya ini dimulai dari tukang ketik", motivasi Iqbal yang kerap dilontarkan kepada stafnya. Mohamad Iqbal Apriansyah atau yang kerap disapa dengan Iqbal, pria yang lahir dan besar di Jakarta pada 23 April 1982, memulai

karirnya dari CPNS atau Calon Pegawai Negeri Sipil di tahun 2005 dan setahun kemudian diangkat menjadi PNS di tahun 2006. Perjalanan karir panjang Iqbal lebih dari satu dekade menunjukkan komitmen dan integritas yang tinggi, yang hingga kini menduduki posisi Kepala Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta yang dikukuhkan langsung oleh Gubernur D.I. Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di tahun 2024.



“Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya”

Karir saya ini dimulai dari tukang ketik

Perjalanan panjang yang dilampai Iqbal, dimulai dari pendidikan yang memerankan hal penting dalam perjalanan karirnya. Iqbal menyelesaikan Program Sarjana di bidang Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2004 dan melanjutkan Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2009. Iqbal adalah pribadi yang ingin terus belajar serta komit untuk selalu profesional, terbukti dari berbagai pelatihan dan sertifikasi yang diikutinya.

"Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya", menjadi acuan Iqbal dalam menyelesaikan berbagai tantangan di pekerjaannya. Bahwa pekerjaan bukan hanya sebuah tugas yang harus diselesaikan, namun merupakan salah satu wadah untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara. Hal ini dibuktikan dengan perjalanan karir dari jabatan struktural dan fungsional yang menjadikan beliau memakan asam garam dalam menjadi staf maupun pemimpin di BKKBN.

18 Tahun pengabdian Iqbal menunjukkan komitmen dan integritas yang tinggi pada instansi, hal tersebut dibuktikan dengan dianugerahinya Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun, sebuah tanda kehormatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah bekerja secara terus menerus selama 10 tahun. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan yang ditunjukkan PNS dalam melaksanakan tugasnya. Tak hanya berhenti sampai disitu, kinerja yang Iqbal tunjukkan mendapatkan predikat di atas ekspektasi dengan predikat sangat baik. Hal ini menandakan bahwa betapa besarnya dedikasi Iqbal kepada organisasi, sehingga melampaui harapan.

Di balik kesuksesan Iqbal ada dukungan yang luar biasa dari sang istri, Daracut Imalisa Bustaman. Mereka membangun keluarga bersama dan dikaruniai tiga anak yang menjadi inspirasi utama bagi Iqbal untuk terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi masa depan keluarga serta masyarakat di Indonesia.

Pengukuhan Oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Mohamad Iqbal Apriansyah di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Pemda DIY, Senin (7/10/2024). Dalam kesempatan itu Sultan mengajak BKKBN untuk mengambil langkah terstruktur dan berdasarkan data yang akurat.

Sultan menyebut Kepala Perwakilan BKKBN DIY yang baru harus bisa bersinergi dengan Pemda DIY untuk fokus pada Program Bangga Kencana, terutama terkait dengan penanganan stunting. Selain itu, perlu juga membuat program untuk memaksimalkan potensi terhadap bonus demografi.

Sepi ing pamrih, rame ing gawe.

Hal ini merupakan peluang besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. "Harus menerapkan *sepi ing pamrih, rame ing gawe*, bekerja tanpa pamrih pribadi. Bonus demografi harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk investasi SDM yang masif dan berkelanjutan.

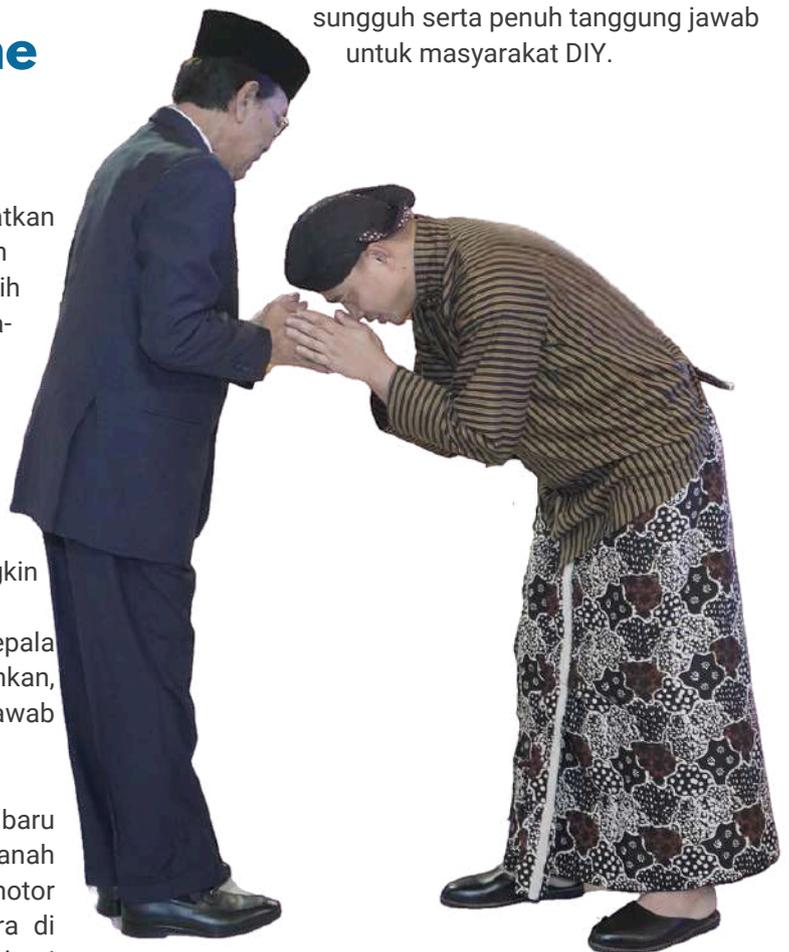
Sultan berharap Perwakilan BKKBN DIY bersama Pemda DIY dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komitmen dan kerja sama. Bonus demografi harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan keluarga di DIY. Kepada Kepala Perwakilan BKKBN DIY yang baru saja dikukuhkan, Sultan mengatakan, kepercayaan dan tanggung jawab besar kini berada di pundaknya.

"Kepada Kepala Perwakilan BKKBN DIY yang baru dikukuhkan, semoga dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, serta menjadi motor penggerak dalam menciptakan keluarga sejahtera di DIY. Mari kita bekerja sama, bahu-membahu, demi mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat."

Sementara itu, Plt. Kepala BKKBN Sundoyo mengatakan DIY mengalami puncak bonus demografi pada 2020 yang lalu sebesar 39,0 dan terus meningkat hingga 2030-2035.

Hal ini bisa memunculkan fenomena *Growing Old Before Going Rich* (Menua tanpa peningkatan kesejahteraan) jika tidak ditangani dengan benar. Kondisi ini mengakibatkan lansia menjadi beban kelompok usia produktif. Berbagai tantangan di DIY ini menurut Sundoyo menjadi alasan untuk memilih pemimpin yang kompeten, berintegritas dan memiliki jiwa melayani untuk ditempatkan di DIY.

Mohamad Iqbal Apriansyah menurutnya merupakan pemimpin muda yang memiliki kemampuan untuk membangun DIY. Sundoyo pun optimistis bahwa yang bersangkutan mampu mengemban dan melaksanakan tugas dan baktinya dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab untuk masyarakat DIY.



"Saudara Mohamad Iqbal Apriansyah dipilih melalui mekanisme seleksi terbuka yang sangat kompetitif, adil, dan transparan dimana perolehan nilai pada seluruh tahapan diumumkan dan dapat diakses oleh semua pihak. Harapannya untuk segera menjalankan tugas dengan baik dan mengambil langkah-langkah strategis dalam tugasnya yang baru

Terbaik Pertama Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Perwakilan BKKBN DIY menerima *Treasury Award* dari Kanwil DJPb Provinsi DIY sebagai Terbaik Pertama Kategori Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan 1 (satu) sampai 3 (tiga) Satuan Kerja.

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara atau Lembaga



Perwakilan BKKBN DIY memperoleh nilai IKPA 100 untuk periode Triwulan III TA. 2024.

IKPA menjadi instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan *value for money* belanja Kementerian/Lembaga, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output serta perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada satker, Eselon I dan Kementerian/Lembaga.

Penilaian IKPA tahun 2024 meliputi 3 aspek pengukuran, yaitu:

1. Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran dengan indikator revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA
2. Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dengan indikator penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP
3. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan indikator capaian output.

KB Pasca Persalinan, Jurus Jitu Cegah Stunting Baru

“ Cara paling pasti dalam menurunkan angka stunting adalah dengan mencegah lahirnya bayi stunting”



Jika dapat dipastikan seluruh bayi baru lahir bebas stunting, secara otomatis angka stunting akan turun. Tentunya harus dibarengi pula dengan penanganan yang tepat bagi bayi yang (terlanjur) stunting.

Jika langkah pendampingan bagi calon ibu dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat telah dilakukan, masih ada upaya mencegah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) untuk mencegah lahirnya bayi stunting. KTD bisa terjadi karena jarak yang terlalu dekat dengan kehamilan sebelumnya, hamil pada usia rawan (terlalu tua atau terlalu muda) yang semuanya sangat beresiko melahirkan bayi stunting karena kondisi ibu dan rahim yang tidak ideal untuk hamil.

Oleh karena itu BKKBN mendorong para ibu hamil untuk ber-KB sesegera mungkin setelah melahirkan sebagai upaya mencegah stunting melalui program yang dikenal dengan KB Pasca Persalinan (KBPP). Maksud dari program ini adalah mendorong para tenaga kesehatan (nakes) yang memeriksa ibu hamil dan menolong kelahiran untuk memotivasi para ibu hamil agar langsung berKB sesegera mungkin setelah melahirkan.

“KB Pasca Persalinan ini merupakan salah satu upaya dalam program percepatan penurunan stunting,” tandas Iqbal. Bahkan sebetulnya, lanjutnya, KBPP merupakan upaya percepatan penurunan stunting yang paling awal, karena mencegah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki yang beresiko stunting.

Sedangkan angka kelahiran TFR/Total Fertility Ratio) di DIY sebesar 1.81 saat ini termasuk yang terendah selain

Bali dan DKI. Hal ini TFR ini sudah di bawah TFR ideal untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang yang secara teoritis ada pada angka 2,1. Meski secara nasional TFR masih di atas 2,2 namun Kepala Perwakilan BKKBN DIY berharap angka TFR DIY ini tidak turun lagi karena akan mengganggu pertumbuhan dan struktur piramida penduduk DIY.

Data yang dirilis Dinas Kesehatan DIY memperlihatkan bahwa dari sampai dengan akhir Oktober di DIY terdapat 24.907 kelahiran, dimana 58,39% atau 14.544 ibu bersalin setuju dan melaksanakan KB Pasca Persalinan. Capaian KBPP 58,39% pada bulan Oktober ini melebihi target 2024 yang diberikan BKKBN sebesar 50% ibu melahirkan menggunakan KB Pasca Persalinan (target KBPP dari pemerintah daerah bahkan hanya 40% saja).

Capaian KBPP 58,39% pada bulan Oktober ini melebihi target 2024 yang diberikan BKKBN sebesar 50% ibu melahirkan menggunakan KB Pasca Persalinan (target KBPP dari pemerintah daerah bahkan hanya 40% saja).

Ditarget 1, BKKBN DIY Berhasil Bentuk 10 Sekolah Lansia

Ageing Population dimaknai sebagai era penduduk menua, dimana proporsi penduduk lansia mengalami peningkatan secara progresif. Dilansir dari BPS, 2023, sebesar 11.75% dari penduduk Indonesia merupakan lansia. Kondisi ini menjadikan Indonesia memiliki rasio ketergantungan lansia sebesar 17.08, yang berarti setiap 100 orang dari penduduk usia produktif haruslah menanggung sekitar 17 orang lansia.

Dari 3.761.870 jiwa penduduk di DIY, sebesar 625.020 jiwa merupakan lansia. Hal ini menjadikan Yogyakarta sebagai provinsi dengan presentase penduduk lansia paling tinggi di Indonesia, yakni 16.61%. Presentase yang tinggi tersebut selaras dengan usia harapan hidup DIY yang juga tertinggi di Indonesia, yakni 75,12 tahun.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN DIY untuk mengoptimalkan kondisi tersebut adalah dengan membentuk Sekolah Lansia yang terintegrasi dalam kegiatan Bina Keluarga Lansia.

“Besarnya jumlah lansia ini diiringi dengan potensi dan kondisi yang ada. Meski sudah melewati usia produktif, harapannya lansia tetap dapat menjadi penggerak ekonomi, sosial juga budaya.” Ujar Tavip Sestama BKKBN RI pada saat memberikan sambutan di acara Wisuda Sekolah Lansia di auditorium LPP Yogyakarta (9/10/24)

“Sekolah lansia yang mengusung konsep andragogi, dimana peserta didik dilibatkan dalam proses pembelajaran efektif dan efisien dengan prinsip partisipasi, keswadayaan dan kesinambungan hendaknya dapat menjadikan lulusan sebagai insan lansia yang SMART (Sehat, Aktif, Mandiri dan Bermartabat) sehingga dapat menjadi daya ungkit dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga.” Pungkas Tavip.

Kepala Perwakilan BKKBN DIY Mohamad Iqbal Apriansyah SH, MPH menyampaikan, “Dalam upaya peningkatan hidup lansia inipun diperlukan integrasi dan keterpaduan lintas sektor serta masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kualitas hidup lansia Indonesia.”



Sekolah Lansia merupakan salah satu penerapan dari Tujuh Dimensi Lansia Tangguh. Memupuk rasa keberhargaan diri bagi lanjut usia adalah penting dalam memotivasi lansia untuk tetap berkarya, produktif dan punya semangat hidup agar bermanfaat bagi generasi penerus. Lulusan Sekolah Lansia diharapkan mampu memberikan pengalaman dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang diturunkan leluhur dari generasi ke generasi di era jaman yang semakin berubah.



Di Tahun 2024 Perwakilan BKKBN DIY memiliki target pembentukan 1 Sekolah lansia, namun capaiannya di D.I.Yogyakarta dapat terbentuk 10 Sekolah Lansia yang terdiri dari 2 Sekolah Lansia dengan dukungan Anggaran APBN, 6 Sekolah Lansia dengan dukungan APBD dan 2 Sekolah Lansia dengan Anggaran Mandiri.



Internalisasi Pengasuhan Balita guna Percepatan Penurunan Stunting di Kelas Orang Tua Hebat (KERABAT)



“**Anak adalah aset yang tak ternilai yang akan menentukan masa depan bangsa**”

11 KERABAT KERJA SAMA DENGAN HIMPSI

Untuk mewujudkan Era Indonesia Emas tahun 2045 perlu dipersiapkan generasi yang berkualitas dan untuk mencapainya banyak hal yang harus dilakukan. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh BKKBN adalah melalui Kelas Orang tua Hebat (KERABAT).

Seluruh 11 Seri Kelas Orang Tua hebat (KERABAT) berhasil dituntaskan berkat dukungan penuh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) yang menurunkan narasumber praktisi psikologi yang kompeten

Kelas Orang Tua Hebat (KERABAT) adalah kelas pengasuhan secara daring yang diampu oleh Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan orang tua dan para Pengelola Kegiatan BKB (PKB/PLKB dan Kader) dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Series KERABAT 2024 dilaksanakan dalam 11 Seri (Januari – November), dan di akhir penyelenggaraan akan dilaksanakan Wisuda Orang Tua Hebat.

Anak adalah aset yang tak ternilai yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Dalam menyambut Era Indonesia Emas tahun 2045 salah satu perhatian penting adalah faktor

kualitas SDM dimana untuk mewujudkannya harus bebas dari stunting karena stunting menghambat tumbuh kembang anak. Fisik lebih pendek dari rata-rata anak seusianya, lebih mudah sakit, dan perkembangan IQ kecerdasannya terhambat.

Kepala Perwakilan BKKBN DIY berharap melalui kegiatan ini bisa memberikan bekal para kader Bina Keluarga Balita (BKB) dalam mengajak keluarga-keluarga di DIY untuk lebih memperhatikan pengasuhan anak.

Dengan pengasuhan yang baik dapat dicegah terjadinya kasus stunting. Walau saat ini berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023 Sleman sudah melampaui target nasional penurunan stunting di bawah 14 persen namun risiko terjadinya stunting harus tetap diwaspadai.



Dorong UPPKA Naik Kelas, Miliki NIB Dan Gabung Sibakul Jogja Agar Gratis Kirim Barang Ke Seluruh Indonesia



Para pengguna kontrasepsi (akseptor) oleh BKKBN tidaklah dibiarkan begitu saja, melainkan dipantau dan dikuatkan kesertaan berKBnya agar tingkat putus pakai dapat ditekan serendah mungkin. Mereka direngkuh dalam wadah yang sekaligus mengupayakan peningkatan pendapatan keluarga, yaitu dalam wadah Kelompok UPPKA atau Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor, yang jumlahnya di DIY saat ini mencapai 1.462 kelompok. BKKBN Pusat menargetkan seluruh kelompok UPPKA di Indonesia untuk memiliki NIB sampai dengan 31 Maret 2025. Sedangkan Untuk DIY, sampai dengan Oktober 2024 Sudah memiliki 424 NIB.

Perwakilan BKKBN DIY menggandeng Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk membina kelompok-kelompok UPPKA agar usahanya bisa berkembang dan “naik kelas” dengan bergabung sebagai kelompok sasaran program SiBakul Jogja oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY.

SiBakul Jogja merupakan akronim dari Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan UKM DIY. SiBakul Jogja merupakan bentuk digitalisasi model Pembinaan Sirkular DISKOP UKM DIY bagi pelaku Koperasi dan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain pembinaan berupa pelatihan manajemen usaha dan fasilitasi perizinan, maka yang khas dari program ini adalah subsidi seluruh biaya ongkos kirim ke seluruh penjuru nusantara bagi kelompok usaha kecil menengah yang memenuhi sejumlah kriteria tertentu.

Pemberian subsidi berupa ditanggungnya ongkos kirim ini tentu saja sangat menguntungkan bagi UKM yang menjual produknya secara online. Data menunjukkan terjadi peningkatan transaksi UMKM markethub free ongkir pada wilayah miskin DIY sebesar lebih dari dua kali lipat pada 2022.

Pelaku UKM yang memenuhi persyaratan tertentu yang bergabung dalam SiBakul Jogja akan mendapatkan berbagai kemudahan dan fasilitasi, diantaranya yang paling berdampak langsung adalah fasilitas bebas ongkos kirim dalam pemasaran onlinenya. Pemda DIY yang menanggung subsidi

ongkos kirim tersebut sehingga UKM dapat lebih ekspansif dalam berusaha. Keuntungan lainnya adalah pelatihan, pendampingan dan konsultasi usaha, serta bantuan dalam promosi online.

Syarat untuk bisa bergabung adalah telah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan memenuhi kualifikasi yang terkait safety. Oleh karena itu BKKBN sebagai pembina UPPKA intensif berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY. Salah satunya dengan kegiatan akselerasi penerbitan NIB bagi UPPKA. Selain NIB, Kelompok UPPKA DIY juga tergabung dalam aplikasi Yo Sakurga. Yo Sakurga adalah aplikasi berbasis smartphone dan website yang diluncurkan oleh BKKBN. Kelompok UPPKA di DIY sudah memiliki 1.506 Akun Yo Sakurga (103%)

“Kalau mau produksi laku, maka buatlah produk yang dibutuhkan dan disukai pasar”

Pemutakhiran PK-24 di DIY Selesai Tepat waktu, Hasilnya Melebihi Target Hingga 100,19%

Pendataan Keluarga merupakan kegiatan yang krusial karena menyediakan basis data keluarga sebagai bahan intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program pembangunan lainnya di Indonesia. Selain data keluarga juga menghasilkan data individu *by name by address* yang menjadi peta sasaran intervensi program yang meliputi indikator demografi, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta keluarga berisiko stunting dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, sampai dengan tingkat RT bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil.



Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) sebagai peraturan pelaksanaan mewajibkan terhadap Pendataan Keluarga yang telah dilaksanakan untuk dilakukan pemutakhiran setiap tahun.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan data dan informasi keluarga terkini sesuai kondisi di lapangan baik untuk kepentingan program Bangga Kencana maupun program pembangunan lainnya, maka data tersebut harus dimutakhirkan, melalui Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024 (Pemutakhiran PK-24).

Pemutakhiran PK – 24 di DIY telah dilaksanakan sesuai jadwal mulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2024 dan ada masa perpanjangan sampai 7 September 2024. Sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran PK-24 telah dilakukan pertemuan dalam rangka konsolidasi serta sosialisasi bersama dengan seluruh pengelola data dan informasi tingkat provinsi,

kabupaten, manager pengelolaan dan manager data yang berada di kapanewon/kemantren.

Pendataan ini dilakukan oleh para kader pendata dan DIY 100 % menggunakan smartphone sebagai alat untuk pencatatan dan pelaporannya. Pemutakhiran PK-24 merupakan kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada pada data hasil Pendataan Keluarga melalui kunjungan rumah dengan cara mewawancarai atau mengobservasi keluarga.

M. Iqbal Apriansyah selaku Kepala Perwakilan BKKBN DIY sejak masih menjabat Plt dan kemudian dilantik sebagai pejabat definitif secara intensif memantau untuk mempercepat progres Pemutakhiran PK sehingga capaian pemutakhiran DIY mencapai angka 100,19% dari target dan berada di peringkat kelima nasional.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Janji cinta Menuju Predikat ZI-WBK



Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, berbagai instansi/unit kerja baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupaya untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Perwakilan BKKBN DIY tahun 2024 ini diusulkan oleh BKKBN (pusat) untuk memperoleh predikat ZI-WBK.

Untuk mendapatkan predikat ZI-WBK ini tidak mudah, karena harus mampu membuktikan komitmen bebas

korupsi pada unit kerja melalui seperangkat instrumen penilaian yang telah disiapkan oleh Kemenpan RB. Untuk itu Kepala Perwakilan telah membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI WBK/WBBM. Tim ini secara intensif mempersiapkan pemenuhan semua persyaratan yang ditetapkan untuk meraih predikat ZI-WBK bagi BKKBN DIY, dalam bentuk Lembar Kerja Evaluasi (LKE) beserta bukti dukungnya yang harus diserahkan/diunggah tepat waktu.

Dalam hal pemenuhan target kinerja, Perwakilan BKKBN DIY telah mencatatkan capaian program yang baik. Namun Kepala Perwakilan BKKBN DIY Mohamad Iqbal Apriansyah tidak ingin unit kerja yang dipimpinnya berhenti pada capaian kinerja yang baik saja. Capaian program yang bagus dari BKKBN DIY akan terasa lebih lengkap jika diikuti dengan pengakuan terhadap kinerja aparatur yang bebas korupsi.

“Capaian program yang bagus tidak mungkin kita raih kalau dalam bekerja kita menyimpang dari ketentuan. Maka merupakan hal yang penting bagi kita untuk mendokumentasikan proses kerja kita secara benar dalam bentuk SOP dan mekanisme kerja yang jelas.





Kerja keras, benar, dan bersih saja tidak cukup, kita harus bisa menunjukkannya melalui perangkat evaluasi atau Lembar Kerja Evaluasi,” demikian disampaikan Iqbal saat bersama jajarannya mengikuti Pendampingan Pemenuhan Kriteria Evaluasi Pengusulan Calon Unit ZI-WBK/WBBM oleh Tim dari Inspektorat Utama BKKBN.

Dari hasil pendampingan Inspektorat tersebut Perwakilan BKKBN DIY dinyatakan layak menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan untuk mengikuti penilaian ZI WBK oleh Tim Penilai Nasional dari KemenPAN RB. Penilaian telah dilaksanakan pada 22 Oktober 2024 lalu.

Beberapa hal yang di optimalkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN dan jajarannya adalah dengan memaksimalkan 6 area perubahan yaitu Area Manajemen Perubahan, Area Penataan Tata Laksana, Area Penataan Sistem Manajemen SDM, Area Penguatan Akuntabilitas, Area Penguatan Pengawasan dan Area Peningkatan Pelayanan Publik. Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Salah satu inovasi pada area Manajemen Perubahan adalah dengan melaksanakan gerakan “Janji Cinta”. Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Pegawai Perwakilan BKKBN DIY sepakat memajang foto keluarga masing-masing di meja kerja.



Capaian program yang bagus dari BKKBN DIY akan terasa lebih lengkap jika diikuti dengan pengakuan terhadap kinerja aparatur yang bebas korupsi. Capaian program yang bagus tidak mungkin kita raih kalau dalam bekerja kita menyimpang dari ketentuan.

M. Iqbal Apriansyah

Selain bertujuan untuk meningkatkan kinerja juga menjadi pengingat bagi para pegawai untuk tidak tergoda melakukan hal-hal tercela yang pada akhirnya justru akan menyengsarakan keluarga tercinta di rumah.



Selain 6 area perubahan yang ada di perwakilan BKKBN DIY, sebagai pendukung Perwakilan BKKBN DIY juga menyampaikan inovasi-inovasi yang ada seperti *Learning Management System* “Sinta”, pemanfaatan *Media Production Centre* (MPC), kolaborasi Satyagraha dan mitra kerja, serta program Sekolah Lansia yang saat ini bahkan telah diadopsi menjadi program nasional yang awalnya merupakan program unggulan Perwakilan BKKBN DIY.

Population Clock, Gugah Kesadaran Masyarakat Terhadap Isu Kependudukan

Dalam upaya meningkatkan pengendalian penduduk dan memberikan informasi akurat secara *real-time*, BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Dinas Komunikasi dan Informatika DIY meluncurkan *Population Clock* atau Jam Kependudukan. Peresmian *Population Clock* secara langsung oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, yang menandai langkah signifikan dalam pengelolaan data kependudukan di Yogyakarta, Kamis (31/10/2024)



Population Clock atau Jam Kependudukan merupakan pengembangan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk yang menampilkan data kependudukan secara *realtime*. Data yang ditampilkan meliputi perkiraan jumlah penduduk, perkiraan jumlah kelahiran dan perkiraan jumlah kematian di suatu wilayah. *Population Clock* dibuat berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Setelah melalui diskusi dan survei lokasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIY, *Population Clock* ditampilkan dalam bentuk videotron milik Dinas Kominfo DIY pada tiga titik yaitu di kantor Dinas Kominfo Yogyakarta Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta, Pintu masuk Grhatama Pustaka di Jalan Janti Banguntapan, Bantul, dan pada pintu keluar Bandara YIA, Kulon Progo.

Pada Tahun 2024 ini dengan dikembangkannya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu),

Population Clock telah dikembangkan menjadi berbasis website yang memungkinkan pengguna internet untuk mengakses *Population Clock* dimanapun dan kapanpun secara *online*. Hal ini merupakan salah satu bagian dari upaya peringatan dini pengendalian penduduk, bertujuan untuk memberikan informasi mengenai potensi masalah kependudukan yang mungkin timbul, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

“Bekerja sama dengan Dinas Kominfo DIY, berhasil dipasang *Population Clock* pada 3 titik strategis. Dengan peluncuran *Population Clock*, masyarakat diharapkan semakin menaruh perhatian terhadap perkembangan isu kependudukan.”



Dengan peluncuran *Population Clock* ini, diharapkan masyarakat DIY dapat lebih memahami dan memperhatikan perkembangan kependudukan, sehingga berkontribusi pada pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pesan Cegah Stunting Bagi Bapak-Bapak : Hobi Itu Perlu, Tapi Belanja Untuk Gizi Bumil Dan Balita Juga Penting

Saat ini banyak dijumpai bapak-bapak muda yang sampai mengalokasikan sebagian pendapatan bulannya untuk menikmati hobi. Ya, tanggungan hidup belum terasa karena belum punya anak atau anak masih kecil. Sedangkan semangat kerja sedang dalam puncak karena masih usia muda dan enerjik sehingga penghasilan terasa banyak lebihnya dibanding pengeluaran.

Hobi gowes atau bersepeda, jika dituruti uang berapapun bisa terasa kurang. Hobi mancing, audiophile (menikmati audio kelas atas) adalah sebagian dari jenis hobi yang juga bisa menguras kantong jika mengejar peralatan terbaik dan bergensi yang jelas mahal.

Adalah Mohamad Iqbal Apriansyah, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, yang terbersit ide untuk mengingatkan kaum bapak-bapak muda ini agar tidak melupakan mengalokasikan belanja yang cukup bagi pemenuhan gizi istri yang tengah bersiap atau sedang hamil serta anak yang dilahirkan, agar tidak mengidap stunting.

Iqbal sendiri adalah seorang bapak muda yang enerjik dan juga memiliki putri bungsu berusia 3 tahun. Ya, Iqbal pun termasuk golongan bapak muda yang senang menggeluti hobi traveling.

Tak membuang waktu, Kaper muda ini segera memanggil Tim KIE dan Humas untuk merumuskan ide-ide.

“Saya sadar, ide ini juga merupakan peringatan bagi saya pribadi yang punya hobi traveling. Kadang tidak terasa banyak juga ya yang saya belanjakan untuk hobi ini” aku Iqbal

Setelah berdiskusi dengan Tim, disepakati untuk menggunakan program TVRI Yogyakarta “Angkringan” yang konsisten dengan joke jenaka yang mengundang tawa dan banyak digemari masyarakat Yogyakarta, Jawa Tengah bahkan Jawa Timur.

Ide cerita sebenarnya sederhana. Seorang Angkringers (sebutan bagi pelanggan angkringan) yang nakal, Dalijo, mengakali tiga temannya yang punya hobi lumayan mahal. Mereka adalah Aldo Iwak Kebo yang hobi berburu dan baru saja membeli senapan lengkap dengan teleskop dan peredam, Rio Srundeng sang pemilik angkringan yang memamerkan alat pancingnya yang canggih, serta Ari Kenyut yang memelihara burung perkutut bersuara bagus.

Dalijo menakuti-nakuti Aldo Iwak Kebo bahwa bila berani menembak hewan buruan akan mendapatkan karma anak yang akan dilahirkan istrinya nanti menjadi anak stunting.

Aldo yang termakan ketakutan karangan Dalijo terpaksa merelakan senapan mahal dibeli murah oleh Dalijo demi anaknya nanti terhindar stunting. Demikian pula kepada Srundeng dan Ari Kenyut, Dalijo menipu mereka dengan dalih menjadi pahlawan agar anak para angkringers tidak stunting

Untungnya ketiga korban kelicikan Dalijo ini bertemu dengan Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Iqbal, yang kebetulan mampir di angkringan sepulang kerja.

Kepada mereka dan pengunjung angkringan lainnya Iqbal menjelaskan bahwa stunting itu adalah kegagalan tumbuh kembang akibat kekurangan gizi kronis (dalam waktu lama) yang dialami ibu sebelum dan selama hamil, dan/atau dialami bayi setelah dilahirkan. Selain itu stunting juga bisa disebabkan karena infeksi berulang yang diderita bayi.

“ Saya sadar, ide ini juga merupakan peringatan bagi saya pribadi ,,



Kerjasama BKKBN DIY Dan Korem 072/ Pamungkas Penuhi Kebutuhan Air Bersih Bagi 2.013 Jiwa Keluarga Risiko Stunting

Prajurit TNI AD Korem 072/Pamungkas telah melakukan banyak upaya untuk membantu percepatan penurunan stunting di wilayah kerjanya, yang meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah sebelumnya terlibat aktif dalam Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) yang memberikan bantuan telur bagi anak risiko stunting dan bedah rumah tidak layak huni, kini TNI AD kembali berkiprah dengan upaya mencukupi kebutuhan air bersih bagi keluarga berisiko stunting.

Setelah dilakukan survei didapatkan empat titik lokasi di empat kabupaten. Sebanyak 501 Kepala Keluarga risiko stunting dengan 2.031 jiwa di lokasi sulit air akan menerima manfaat dari program ini.

Di tingkat nasional, upaya ini merupakan tindak lanjut atas Perjanjian Kerjasama antara Kepala BKKBN RI dengan Kepala Staf TNI AD pada 10 Juli 2024 tentang Dukungan Terhadap Program TNI AD Manunggal Air Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting.

Sebagaimana terungkap pada rapat persiapan di ruang Kencana Perwakilan BKKBN DIY, Rabu (28/08/2024), setelah dilakukan survei didapatkan empat titik lokasi di empat kabupaten. Sebanyak 501 Kepala Keluarga risiko stunting dengan 2.031 jiwa di lokasi sulit air akan menerima manfaat dari program ini. Di Kabupaten Gunungkidul bahkan berdasarkan pengukuran dengan alat khusus dibutuhkan pengeboran mencapai 90-105 meter untuk mencapai sumber air

Sedangkan di Kabupaten Kulon Progo karena ada sumber mata air maka akan dipasang pompa dan dibangun perpipaan untuk mendistribusikan air.

Dalam rapat koordinasi ini Pasi Bhakti Mayor Timotius Subanu yang mewakili Komandan Korem menyatakan kesiapan jajarannya menindaklanjuti kerjasama Mabes TNI AD dengan BKKBN ini.

Untuk pelaksanaan kegiatan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, Korem Pamungkas dan BKKBN DIY menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Rumah Zakat yang mendukung sebagian dari kebutuhan dana yang diperlukan. Jalaludin dari BAZNAS DIY mengungkapkan bahwa sebagaimana program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang juga BAZNAS lakukan bersama TNI, kontribusi masyarakat dan pihak-pihak lain selalu muncul.

“Tenaga pelaksana gotong royong oleh masyarakat dan TNI, dan warga ada yang menyumbang pasir, batu dan sebagainya pada rehab RTLH selama ini. Pada program air bersih ini tentunya model tersebut juga kita terapkan” harap Jalaludin. Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN DIY Muhamad Iqbal Apriansyah dalam arahannya mengharapkan agar titik lokasi segera dapat dipastikan. Tentunya menasar pada keluarga risiko stunting.



BKKBN DIY Kembangkan Portal SINTA, Mengikuti Diklat Makin Mudah Berkat Sistem Flexible Learning



SINTA
Orientasi dan Databasis Tim Pendamping Keluarga

Berawal dari kesulitan melaksanakan pelatihan bagi 5.000 lebih anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) DIY secara hybrid (daring dan luring) Perwakilan BKKBN DIY menggagas penerapan metode pembelajaran alternatif yang sesuai. Memang tidak mudah mengkondisikan peserta pelatihan yang banyak jumlahnya tersebut untuk bisa bertemu atau meluangkan waktu pada waktu yang sama untuk mengikuti pembelajaran, walau dengan metode daring sekalipun.

Anggota TPK merupakan relawan pendamping calon pengantin dan keluarga risiko stunting. Setiap Tim beranggotakan 3 orang dari unsur PKK, Bidan Desa, dan Kader KB. Sebagai relawan tentunya para anggota TPK mempunyai kesibukan harian masing-masing. Apalagi keanggotaan TPK setiap waktu bisa berubah karena anggota pindah domisili, atau mengalami kondisi lainnya yang tidak memungkinkan. Tentunya akan menghabiskan banyak biaya dan tenaga serta pemikiran bila anggota baru yang tidak tentu jumlah dan waktunya itu harus dibuatkan pelatihan secara khusus.

Mohamad Iqbal Apriansyah menyambut baik dan mendorong pengembangan metode pembelajaran ini. Selain meningkatkan kualitas dan jangkauan pelatihan, pengintegrasian dalam Portal Sinta khususnya dalam hal database TPK akan mempermudah evaluasi baik internal maupun oleh aparat pengawas eksternal. Sementara Kapusdiklat menyempatkan hadir karena tertarik dengan metode yang dikembangkan BKKBN DIY ini.

Dalam pembelajaran Online konvensional, pertemuan tatap muka dilakukan secara virtual (disebut tatap maya) dan pada website atau portal yang dikhususkan

ditempatkan bahan-bahan pembelajaran berupa video dan materi lainnya untuk pengayaan peserta pelatihan. Pertemuan virtual dilakukan dalam satu waktu tertentu oleh sejumlah fasilitator, dan secara interaktif peserta bisa bertanya langsung. Hal ini belum bisa menjawab kesulitan untuk memastikan seluruh peserta bisa bergabung dalam waktu yang sama.

Pengalaman Bidang Latbang BKKBN DIY selama tiga tahun menyelenggarakan orientasi TPK, tidak pernah

berhasil memberikan orientasi kepada seluruh anggota TPK. Selalu saja dijumpai anggota yang berhalangan mengikuti orientasi bersama-sama dengan yang lain. Mengupayakan pembelajaran susulan bagi mereka tentu tidak bisa dengan mudah dilakukan karena terkait dengan pembiayaan dan efisiensi waktu serta tenaga dan pemikiran untuk mengorganisasikan pelatihan ulang. Di sisi lain, orientasi wajib dilakukan untuk menjamin kualitas pendampingan bagi calon pengantin dan keluarga-keluarga resiko stunting.

Dengan mengembangkan Portal Sinta untuk dapat melaksanakan flexible learning, maka terdapat sejumlah keuntungan sekaligus sejumlah prasyarat tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama setiap anggota TPK dapat mengikuti orientasi atau pelatihan sesuai waktu senggang masing-masing dan dapat mengikutinya di mana saja.

Peserta pelatihan juga leluasa memilih bagaimana mereka akan mempelajari materi karena tersedia pilihan media pembelajaran, yaitu berupa video maupun teks atau modul pembelajaran. Selain itu antara fasilitator dan peserta tidak harus berkomunikasi secara real time (yang sulit pengaturan waktu apalagi jumlah peserta banyak), namun dapat menggunakan model komunikasi asynchronous, artinya akan ada jeda dengan respon fasilitator. Fasilitator juga diuntungkan karena dapat menanggapi banyak penanya sekaligus sehingga lebih hemat waktu.





Kepala Perwakilan BKKBN DIY Naik Motor Sambut Ratusan Motor Penyuluh KB se-Jawa Roadshow Baksos (Roadsos) di Kulon Progo

Ratusan motor yang dikendarai Penyuluh KB (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa tiba di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (23/8/2024). Mereka berkumpul dan melakukan rembuk untuk menggerakkan masyarakat dan lini lapangan melalui kegiatan Roadshow Bakti Sosial (Roadsos) Motor Penyuluh KB 'Ayo Cegah Stunting' yang berlangsung dari 19 hingga 24 Agustus 2024.

Total peserta keseluruhan sebanyak 840 sepeda motor. Sedangkan yang sampai titik pertemuan di Kulon Progo, DI Yogyakarta, sebanyak 288 motor.

Diawali dari kota Banten pada Senin, 19 Agustus 2024, 75 rombongan pemotor memulai perjalanannya melalui berbagai kota menuju ke Kulon Progo, Tak kalah pula dari Jawa Timur, memulai perjalanannya dari kota Banyuwangi sebanyak 220 motor. Jawa Barat sebanyak 245 motor.

Kemudian 200 motor juga menyusul dari kota Semarang, Jawa Tengah, yang dilepas oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah pada Selasa, 20 Agustus 2024. Dan 100 pemotor dari DI Yogyakarta.

Saat memasuki wilayah DIY pada hari Jumat (23/08/2024), konvoi motor PKB/PLKB disambut oleh Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Mohamad Iqbal Apriansyah, di wilayah Temon Kulon Progo yaitu perbatasan DIY – Jawa Tengah dengan mengendarai motor dan kemudian turut serta bergabung dalam iring-iringan konvoi para PKB dan PLKB tersebut menuju Kulon Progo.



Esok harinya, sabtu (24/08/2024) rombongan konvoi PKB dan PLKB melaksanakan bakti sosial bedah rumah yang dihadiri langsung oleh Deputi Bidang ADPIN BKKBN Sukaryo Teguh beserta para Kepala Perwakilan BKKBN DIY

Mohamad Iqbal Apriansyah dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi lain se-Jawa.

Program Bedah Rumah ini dimaksudkan untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni terutama terkait sanitasi seperti salah satu titik rumah warga Clapar 3 Kalurahan Hargowilis dimana

rumah tersebut tidak memiliki jamban karena faktor terbesar stunting 70% dipengaruhi oleh sanitasi.





Wagub/Ketua TPPS DIY Apresiasi Predikat “Sangat Baik” Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Kabupaten/Kota

“Bahasanya jangan ndakik-ndakik (tidak membumi)”, peringatan ini disampaikan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) KGPAA Paku Alam X saat membuka pertemuan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dengan tema “Penguatan Kolaborasi Pentahelix untuk Percepatan Penurunan Stunting di DIY” yang diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY bertempat di Grand Rohan Hotel, Banguntapan Bantul Yogyakarta, Rabu (30/10/2024).

Maksud Wakil Gubernur DIY adalah agar dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting harus diutamakan segera mengambil langkah (action) nyata secara cepat dan tepat.

Dalam forum koordinasi tersebut diberikan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi bagi Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting bagi pemerintah kabupaten/kota. Penetapan kinerja tersebut berdasarkan hasil monitoring kinerja pada Web Monitoring Bangda Kemendagri dan Nilai Indikator Lokal Kinerja. Seluruh kabupaten/kota berhasil meraih predikat “Sangat Baik” dengan total skor tertinggi dicapai oleh Kabupaten Sleman (skor 194,9), disusul Kota Yogyakarta (193,6), Kabupaten Kulon Progo (189,2), Kabupaten Gunungkidul (188,2), dan Kabupaten Bantul (186,1).

Sebelumnya Kepala Perwakilan BKKBN DIY Mohamad Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H dalam laporannya kepada Wakil Gubernur dan Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto menyampaikan bahwa Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan kasus stunting melalui intervensi komprehensif dan terintegrasi.

Iqbal memaparkan bahwa pelaksanaan kegiatan strategis percepatan penurunan stunting (*Quick Wins*) yang dilaksanakan di DIY telah berjalan dengan baik, di antaranya adalah Audit Kasus Stunting yang dilaksanakan dalam 2 siklus dan Pemanfaatan Aplikasi Pendampingan melalui Elsimil untuk Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu pasca persalinan serta Ibu yang mempunyai Baduta.

Selain itu ada juga kegiatan Mini Lokakarya di seluruh kapanewon/kemantren di DIY yang merupakan forum rembug stunting di tingkat lapangan, program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang telah memiliki 21 Mitra Pemberi Manfaat dengan Sasaran Penerima Manfaat sejumlah 1.433, serta Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) berjumlah 438 kelompok DASHAT yang tersebar di seluruh wilayah.

Untuk mendukung program percepatan penurunan stunting, mitra kerja maupun stakeholder telah melakukan berbagai inovasi seperti Beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah DIY seperti Digitalisasi Stunting, GERAI MAMI GIZELA (Gerakan Remaja Untuk Penuhi Makan Minum Gizi Lengkap Pada Balita), Safari Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), BANTU-BANTING (“SIBAKUL Membantu Bersama Menurunkan Stunting”)

Apa yang disampaikan Iqbal tersebut sejalan dengan amanat Wakil Gubernur DIY sebelumnya yang menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media. “Perubahan mindset masyarakat dan kearifan lokal sangat penting dalam penanganan stunting. Masih ada pandangan bahwa selama anak kenyang dan tidak rewel, asupan gizinya sudah cukup, padahal ini belum tentu memenuhi standar gizi,” ujarnya.

KGPAA Paku Alam X juga menyoroti tiga langkah prioritas yang akan diimplementasikan, yaitu Koordinasi lintas sektor, Pemanfaatan data dan teknologi informasi, Perubahan perilaku serta pendampingan keluarga.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan dipantau secara berkala, dengan indikator yang jelas hingga akhir 2024. “Kerja sama yang solid dan komitmen tinggi sangat dibutuhkan untuk mencapai target ini. Dengan semangat pantang menyerah, kita yakin bisa mewujudkan masa depan untuk Generasi penerus kita,” tutupnya.

Daerah Istimewa Yogyakarta, BKKBN-nya Juga Harus Istimewa

Sebagaimana pernah disampaikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam berbagai kesempatan, keistimewaan DIY ditopang oleh sinergi empat pilar keistimewaan yaitu Kraton, Kantor, Kampus, dan Kampung yang dikenal dengan 4K Keistimewaan DIY.

Pilar pertama yaitu KRATON merupakan akar keistimewaan DIY yang berbasis budaya. Kesadaran kolektif rakyat yang menempatkan Raja dan Adipati Pakualaman tidak hanya sebagai simbol budaya melainkan benar-benar penguasa pemerintahan yang berlandaskan prinsip manunggaling kawula Gusti (menyatunya rakyat dan penguasa).

Pilar kedua adalah KANTOR, yang diterjemahkan sebagai birokrasi yang akuntabel, bersih, dan transparan. Birokrasi atau Kantor inilah yang menjalankan roda pemerintahan secara teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan universal yang berlaku di seluruh wilayah NKRI.

Selanjutnya pilar ketiga adalah KAMPUS atau kalangan cerdas cendekia (akademisi). Yogyakarta dikenal sebagai pusat pendidikan tinggi.

Diawali dengan berdirinya Perguruan Taman Siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara, maka sebulan sebelum kemerdekaan atau pada Juli 1945 berdiri Sekolah Tinggi Islam yang dua tahun kemudian berubah menjadi Universitas Islam Indonesia.

Pihak Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat juga turut mensponsori lahirnya Universitas Gadjah Mada pada Desember 1949 dengan menyediakan bangunan milik kraton sebagai kampus awal. Semenjak itu banyak tumbuh universitas, sekolah tinggi, insititut, maupun akademi sehingga Yogyakarta menyandang predikat sebagai pusat pendidikan.

Pilar terakhir adalah KAMPUNG. Kampung adalah gambaran kekompakan (guyub rukun) warga atau komunitas di level bawah atau Desa/Kalurahan hingga Dusun atau RT/RW.

Sinergi 4K Pilar Keistimewaan juga diadopsi oleh Perwakilan BKKBN DIY dalam melaksanakan program Bangga Kencana. GKR Mangkubumi, putri pertama Sri Sultan Hamengku Buwono X berkenan memimpin Badan Pengurus Daerah Asosiasi Koperasi UPPKA (BPD AKU). Kini kepemimpinan BPD AKU diteruskan oleh GKR Bendara, adik dari GKR Mangkubumi. GKR Mangkubumi kini memimpin AKU Pusat.

Dengan Kantor atau birokrasi pemerintah provinsi juga mengikuti kebijakan Gubernur seperti :

1. ASN di BKKBN DIY mengenakan busana jawa gagrak ngayogyokarto setiap kamis pon
2. Mendengarkan kumandang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap hari pada pukul 10.00 WIB
3. Doa bersama sebelum memulai dan setelah mengakhiri pekerjaan setiap harinya.

BKKBN DIY banyak menjalin kerjasama dengan kampus atau berbagai Perguruan Tinggi yang ada. Kerjasama tersebut antara lain meliputi kajian, pengabdian masyarakat dan KKN tematik Program Bangga Kencana.

Sedangkan untuk menggarap kampung, BKKBN memiliki program Tribina (BKB, BKL, BKR) yang menumbuhkan peran aktif komunitas sampai ke tingkat dusun atau RW dan RT.





Piagam Penghargaan yang diterima dalam 100 Hari Kerja Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta



JUARA 1
pengelolaan Keuangan dan BMN Terbaik Tingkat Satuan Kerja



JUARA 2
kategori Pemindahan Barang Milik Negara



TERBAIK 2
Dalam Apresiasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Award Tingkat Provinsi Tahun 2024



PIAGAM PENGHARGAAN
Sebagai Provinsi Dengan 100 Persen Pencapaian Target Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2024



TERBAIK 1
Piagam Penghargaan terbaik 1 Apresiasi KB Pasca Persalinan (ASIK KBPP-BIDAN) kategori Bidan Hits KBPPP Tahun 2024



CAPAIAN PELAYANAN KB TERTINGGI
Kategori Target 10.001-15.000 Akseptor Pada Kegiatan Pekan Pelayanan KB serentak dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia



JUARA 2
Pemilihan Role Model TPMB Tingkat Nasional Regional 1 Kategori Wilayah Non DPTK Tahun 2024



TERBAIK PERTAMA
Kategori Kementerian Negara/Lembaga Berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dengan 1 (Satu) Sampai Dengan 3 (Tiga) Satuan Kerja



PIAGAM PENGHARGAAN
Sebagai Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Berpredikat SANGAT BAIK dengan Nilai Sempurna (100) Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta



“*Hamemayu Hayuning Bawana*”

falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* artinya merawat keindahan, keselarasan, dan kedamaian alam semesta seisinya. Merupakan konsep kesadaran kontemplatif yang ditandai dengan penyelarasan antara makrokosmos dan mikrokosmos, yaitu harmonisasi hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta.

Internalisasi falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* melahirkan pribadi yang berkarakter dan berakhlak mulia yang perilakunya senantiasa mendatangkan kebaikan dan kebermanfaatn bagi sesama manusia maupun alam sekitar.

Tim Penyusun :
Mohamad Iqbal Apriansyah
Rohdhiana Sumariati
Fx.Danarto Suryo Y
Ewang Sewoko
Dewi Setyarum M
Ahmad Affandi
Christin A Adam
Ratnajulie Y
Gunanto



